



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/68/M.SM.02.00/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penetapan Kelas Jabatan Nasional bagi Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang

08 Januari 2025

Yth. Menteri Perdagangan
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : KP.00/241/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Usulan Penyesuaian Kelas Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan secara Nasional, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 99 ayat (3) huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan;
2. Kementerian Perdagangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang mengajukan usulan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan; dan
3. Usulan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional tersebut di atas telah disampaikan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 dan telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan penetapan kelas jabatan nasional bagi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang. Penetapan kelas jabatan nasional dimaksud dijadikan **acuan** bagi Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang di lingkungan Instansi Pengguna, sebagaimana tercantum pada Lampiran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengisian kebutuhan jabatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian penetapan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG SECARA NASIONAL**

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	14	0	
2	12	31	
3	10	138	
4	8	151	
5	9	40	
6	8	63	
7	7	103	
8	5	10	
Total		536	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC



DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Penguji Mutu Barang Pemula	Badan Standardisasi Nasional	5	0	
		Kementerian ESDM		2	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		6	
		Pemerintah Daerah Provinsi Aceh		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		1	
2	Penguji Mutu Barang Terampil	Badan Standardisasi Nasional	7	0	
		Kementerian Perdagangan		16	
		Kementerian ESDM		9	
		Kementerian Perhubungan		15	
		Kementerian Perindustrian		55	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		2	
3	Penguji Mutu Barang Mahir	Badan Standardisasi Nasional	8	0	
		Kementerian Perdagangan		14	
		Kementerian ESDM		7	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		30	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jambi		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		1	
4	Penguji Mutu Barang Penyelia	Badan Standardisasi Nasional	9	1	
		Kementerian Perdagangan		8	
		Kementerian ESDM		6	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		5	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jambi		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Lampung		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		3	
5	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	Badan Standardisasi Nasional	8	0	
		Kementerian Perdagangan		25	
		Kementerian ESDM		8	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		82	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
5	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	8	2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jambi		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		5	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		5	
6	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	Badan Standardisasi Nasional	10	0	
		Kementerian Perdagangan		26	
		Kementerian ESDM		14	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		58	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta		9	
		Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jambi		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		3	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan		4	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		2	
7	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	Badan Standardisasi Nasional	12	0	
		Kementerian Perdagangan		6	
		Kementerian ESDM		2	
		Kementerian Perhubungan		0	
		Kementerian Perindustrian		12	
		Pemerintah Daerah Provinsi Bali		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Riau		2	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara		1	
		Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara		1	
8	Penguji Mutu Barang Ahli Utama	-	14	0	
Jumlah				536	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG SECARA NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)	
1	Penguji Mutu Barang Pemula	5	505	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	1	5
2	Penguji Mutu Barang Terampil	7	705	3	350	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	2	20	1	5
3	Penguji Mutu Barang Mahir	8	850	3	350	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	2	50	2	20	1	5
4	Penguji Mutu Barang Penyelia	9	1350	4	550	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
5	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
6	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	10	1685	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
7	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
8	Penguji Mutu Barang Ahli Utama	14	2820	7	1250	4	450	4	450	4	225	4	255	3	60	3	120	1	5	1	5

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250102UEEC